



### **Hak cipta dan penggunaan kembali:**

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

### **Copyright and reuse:**

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu berperan penting dalam penelitian ini. Salah satunya adalah membantu peneliti untuk menemukan hal baru yang belum terdapat di penelitian sebelumnya. Dengan adanya penelitian terdahulu, peneliti juga bisa mengambil poin-poin yang perlu dikembangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Terdapat tiga penelitian terdahulu yang menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian ini.

Penelitian terdahulu yang pertama berjudul “Jurnalisme Damai Sebagai Upaya Menjaga Perdamaian yang Berkelanjutan” karya Ryan Juliansyah (Juliansyah, 2016), Universitas Syiah Kuala. Latar belakang dari penelitian ini adalah konflik antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan pemerintah Indonesia yang sudah berlangsung 30 tahun. Pemerintah terus berupaya menumpas GAM. Hingga akhirnya pada 15 Agustus 2005, GAM dan pemerintah membuat kesepakatan damai. Hal ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MoU Helsinki.

Untuk mempertahankan perdamaian yang sudah terjalin, media memiliki peran penting dalam menyuguhkan informasi yang objektif dan tidak ada upaya provokasi. Apalagi, Aceh sedang pada tahap transformasi ke masa damai yang

tidak melepas kemungkinan terjadinya gesekan-gesekan. Maka dari itu, media massa khususnya yang berada di Aceh harus menerapkan jurnalisme damai dalam beritanya.

Salah satu media lokal terbesar di Aceh, yaitu Serambi Indonesia merupakan subjek dalam penelitian ini. Cakupan Serambi Indonesia menyentuh seluruh daerah di Aceh dengan cetakan 35 ribu eksemplar setiap harinya. Sebagai media yang berada di daerah konflik, Serambi Indonesia harus membuat berita orientasi pada perdamaian. Hal ini untuk menjaga perdamaian.

Dari latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah pada penelitian ini adalah “sejauh manakah Harian Serambi Indonesia sudah menerapkan jurnalisme damai pada pemberitaan yang terkait dengan kekerasan menjelang pemilihan legislatif Aceh edisi Maret 2014, sebagai upaya menjaga perdamaian Aceh yang berkelanjutan?” Sementara itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana Harian Serambi Indonesia menerapkan jurnalisme damai pada pemberitaan kekerasan menjelang pileg aceh 2014.

Dalam melakukan penelitian, Ryan Juliansyah menggunakan konsep jurnalisme damai dengan 16 unit indikator dan 4 kategorisasi. Pada konsep jurnalisme damai milik Johan Galtung, media harus menjadi resolusi dari konflik. Jurnalisme damai terdiri dari empat orientasi, yaitu perdamaian, kebenaran, masyarakat, dan penyelesaian. Selain itu, penelitian Ryan juga menggunakan beberapa konsep, seperti komunikasi massa, media massa, berita, dan perdamaian yang berkelanjutan sebagai landasan konseptual.

Penelitian milik Ryan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis isi deskriptif. Unit analisis yang dalam penelitian ini adalah berita-berita pada surat kabar Harian Serambi Indonesia yang terkait dengan kekerasan dan ancaman pada momentum menjelang pemilihan legislatif Aceh edisi Maret 2014. Sementara itu, indikator dari berita kekerasan dan ancaman ditinjau dari motif, pelaku, dan korban yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam momentum pemilihan legislative.

Populasi dari penelitian milik Ryan adalah berita-berita terkait dengan kekerasan pada momentum menjelang pemilihan legislatif di Aceh pada tahun 2014 yang diberitakan oleh surat kabar Harian Serambi Indonesia edisi Maret 2014. Sementara itu, sampel dari penelitian ini menggunakan sampel bertujuan berdasarkan pertimbangan ilmiah dan *judgment* yang kuat dari peneliti, seperti berita menggambarkan dua kondisi berbeda (konflik hingga pasca konflik).

Penelitian ini memiliki keterbatasan, di antaranya topik penelitian Ryan hanya terbatas pada topik kekerasan menjelang pemilihan legislatif Aceh pada 2014. Selain itu, subjek penelitian juga terbatas pada surat kabar Harian Serambi Indonesia pada periode Maret 2014 saja.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah pemberitaan terkait kekerasan menjelang pemilihan legislatif Aceh edisi Maret 2014 cenderung provokatif, akan tetapi Harian Serambi Indonesia sudah menerapkan indikator dari jurnalisme damai Johan Galtung. Kemudian, kategori yang paling dominan muncul adalah

kategori perdamaian dan indikator yang paling banyak muncul adalah mengekspos kebenaran di semua sisi.

Penelitian milik Ryan Juliansyah memiliki kesamaan dengan penelitian yang dibuat oleh peneliti. Kedua penelitian mengambil konsep jurnalisme damai sebagai acuan dan dasar-dasar untuk melakukan analisis pada isi teks media. Kedua penelitian juga berfokus pada berita konflik yang ada pada media. Persamaan lainnya terdapat pada metode yang digunakan oleh Ryan Juliansyah dan penulis, yaitu analisis isi kuantitatif.

Namun, penelitian milik Ryan juga memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Pertama, terdapat perbedaan dari media yang digunakan. Pada penelitian milik Ryan menggunakan berita yang bersumber dari surat kabar, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan tayangan berita pada televisi. Kedua, penelitian Ryan hanya berfokus pada 1 media saja, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah melihat tingkat penerapan jurnalisme damai pada tiga media di Indonesia. Perbedaan yang ketiga terdapat pada teknik analisis data. Penelitian milik Ryan menggunakan klasifikasi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan *skoring*.

Penelitian yang kedua berjudul “Peran Media Massa dalam Mencegah Konflik” karya Bend Abidin Santosa (Santosa, 2017). Latar belakang masalah dari penelitian ini adalah keanekaragaman suku, budaya, bahasa, dan agama di Indonesia. Perbedaan tersebut seringkali menimbulkan konflik.

Beberapa konflik yang terjadi di Indonesia bersumber karena adanya perbedaan budaya. Konflik tidak hanya menelan korban dan materi namun juga menghilangkan nyawa ratusan orang. Sementara itu, media sebagai pembawa pesan memiliki peran penting dalam mendefinisikan realitas sosial dan memilih isu apa yang dianggap penting. Penelitian milik Bend Abidin Santosa ingin menganalisis bagaimana media massa yang memberitakan sebuah konflik dengan prinsip jurnalisme damai menjadi salah satu alternatif dan solusi dalam meredam konflik di Indonesia.

Penelitian milik Bend Abidin akan berfokus pada beberapa judul dan isi berita media yang mengandung konflik. Media tersebut di antaranya, Liputan6.com, Antaranews.com, Merdeka.com, Tribunnews.com, Okezone.com, BBC.com, dan Beritasatu.com. Metodologi riset yang dilakukan adalah metode deskriptif - kualitatif. Analisis yang digunakan adalah analisis *framing* dengan berdasarkan teori *agenda setting*.

Teori *Agenda Setting* yang digunakan adalah milik Maxwell McCombs dan Donald Shaw. Pada prinsipnya media massa membentuk persepsi khalayak tentang apa yang dianggap penting oleh media dengan teknik pemilihan dan penonjolan, media memberikan penekanan tentang isu yang lebih penting untuk disajikan bagi khalayak. Karena itu, jurnalis atau wartawan harus tetap berpegang pada kode etik dalam menjalankan tugas. Menurut Ketua AJI Maluku Utara, Mahmud Ici berita yang tidak berimbang akan memicu terjadi konflik sehingga

pemberitaan harus berimbang dan kalau sampai terjadi konflik berarti fungsi penenang dan penerang itu dapat hilang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa media massa mempunyai peran yang signifikan dalam membentuk opini publik dan mengonstruksi realitas di masyarakat dalam menyampaikan berbagai informasi serta nilai-nilai agar tercipta sikap toleransi sehingga tidak timbul konflik. Kesimpulan dari jurnal ini adalah media dapat mengambil fokus pemberitaannya dalam upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak yang bertikai.

Saran dari penelitian milik Ben Abidin Santosa adalah dibutuhkan sinergisitas yang konstruktif antara media massa, Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia, pemerintah, dan masyarakat untuk terus mengkampanyekan setiap pemberitaan dan ekspos media yang edukatif, objektif, damai dan berorientasi pada resolusi konflik.

Penelitian “Peran Media Massa dalam Mencegah Konflik” memiliki kesamaan dengan penelitian yang dibuat oleh peneliti. Kedua penelitian tersebut sama-sama membahas media massa dalam memberitakan konflik. Namun, terdapat beberapa perbedaan antara penelitian milik Ben Abidin Santosa dengan penelitian yang akan dibuat oleh peneliti. Pertama, penelitian milik Ben Abidin menggunakan penelitian kualitatif, sedangkan penelitian milik peneliti menggunakan penelitian kuantitatif. Kedua, teori yang digunakan oleh Ben Abidin adalah *Agenda Setting* dan analisis *framing*, sedangkan penelitian milik peneliti

menggunakan teori tanggung jawab sosial dan konsep jurnalisme damai sebagai konsep utama.

Perbedaan terakhir adalah pada objek yang diteliti. Penelitian milik Bend Abidin Santosa melakukan penelitian pada beberapa media dan hanya menjabarkan saja. Sementara itu, penelitian yang akan dibuat oleh peneliti akan melihat tingkat penerapan jurnalisme damai dalam pemberitaan konflik pada tiga media di Indonesia.

Penelitian terdahulu yang ketiga berjudul “*War/ Peace Journalism Approach in Vietnamese Online Media Coverage of South China Sea Dispute*” karya Nhung Bui. Penelitian tersebut dimuat dalam Semantic Scholar, tahun 2012. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh konflik yang terjadi antara dua negara tetangga, yaitu Cina dan Vietnam. Terdapat dua peristiwa mengenai kapal Cina yang mengganggu kapal eksplorasi Vietnam.

Peristiwa pertama terjadi pada 26 Mei, ketika sebuah kapal Pengawasan Maritim Tiongkok memotong lapisan kabel Binh Vietnam. Peristiwa yang serupa juga terjadi pada 9 Juni ketika perahu penangkap ikan Cina dengan didukung oleh dua kapal administrasi perikanan Tiongkok menabrak kabel survei Viking II - kapal yang disewa oleh Vietnam Oil and Gas Group, ketika sedang melakukan survei seismik di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen Vietnam.

Kedua peristiwa yang terjadi pada akhir Mei dan awal Juni 2011 tersebut menimbulkan perselisihan yang melibatkan Cina, Taiwan, dan empat negara di ASEAN. Perselisihan ini juga pernah terjadi pada masa lampau tahun 1940, ketika



Cina melakukan klaim kedaulatan atas sebagian besar laut yang masih belum juga terselesaikan.

Dalam peristiwa semacam ini, seringkali media digunakan oleh kepentingan petinggi untuk membentuk *image* nasional, mempersuasi opini dunia, dan meningkatkan dukungan terhadap negara. Maka dari itu, penelitian ini mencoba mengembangkan studinya pada empat media, di antaranya yang dikontrol negara dan partai (Vietnamplus), di bawah menteri (VietnamNet – bahasa Vietnam dan bahasa Inggris) dan level perusahaan (Vnexpress).

Rumusan masalah dari penelitian milik Nhung Bui adalah “bagaimana media *online* Vietnam membingkai dua kasus besar yang pernah terjadi dan Cina sebagai negara penuntut terbesar dalam sengketa laut Cina Selatan? Tujuan dari penelitian “*War/ Peace Journalism Approach in Vietnamese Online Media Coverage of South China Sea Dispute*” adalah untuk mengetahui bingkai media *online* Vietnam dalam dua kasus besar yang pernah terjadi dan Cina sebagai negara penuntut terbesar dalam sengketa laut Cina Selatan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah jurnalisme damai yang merupakan bagian dari teori jurnalisme perang oleh Galtung pada tahun 2002. Penelitian Nhung Bui juga tidak hanya meneliti ada atau tidaknya jurnalisme damai pada *framing* dominan media *online* yang di survei oleh peneliti. Lebih dari itu, Nhung Bui mengombinasikan dua teori lainnya, yaitu diplomasi publik dan *World System Theory*. Dengan teori-teori tersebut, dapat diuji hipotesis hubungan

dari diplomasi publik dan jurnalisme damai pada tujuan pesan media dalam menggambarkan konflik.

Penelitian milik Nhung Bui menggunakan *mix methods*, yaitu analisis isi kuantitatif dan analisis wacana kritis kualitatif. Pada penelitian kuantitatif terdapat 207 berita dari dua media lokal dan 133 item berita dari dua media berbahasa Inggris terhitung dari bulan Mei sampai Oktober. Sampel yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. Indikator yang digunakan adalah jurnalisme perang dan jurnalisme damai milik Galtung.

Sementara itu, analisis wacana kritis menggunakan media *online* berbahasa Inggris yang terbit antara 26 Mei sampai 13 Juni. Pemilihan media berbahasa Inggris dikarenakan memiliki peran untuk menginformasikan *audience* asing mengenai Vietnam oleh beberapa pihak usai dua peristiwa terjadi. Lalu, rentang waktu ini dipilih karena pada waktu tersebut Vietnam melakukan latihan militer yang kemungkinan merupakan balasan terhadap pelanggaran Cina.

Keterbatasan penelitian ini adalah waktu dan biaya perjalanan. Hal ini membuat peneliti tersebut tidak dapat melakukan wawancara sebagai teknik penelitian. Penelitian akan lebih utuh dan terkonfirmasi dalam hal analisis konten dan proses analisis wacana kritis, jika peneliti berhasil mewawancarai wartawan dan editor surat kabar. Selain itu, tiga teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan sudut pandang Barat. Keterbatasan lainnya adalah berita berbahasa Inggris dan berbahasa Vietnam memiliki karakteristik yang berbeda.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah menolak hipotesis utama, yaitu bahwa media *online* Vietnam masih memilih kerangka jurnalisme perang. Meskipun bukti secara teoritis dan empiris mengkonfirmasi pendekatan Vietnam yang lembut, meyakinkan, dan tidak provokatif di masyarakat diplomasi dengan Cina. Sementara itu, analisis wacana kritis menyoroti karakteristik media *online* Vietnam dengan bingkai: sangat bijaksana dan implisit. Presentasi yg negatif soal Cina dan positif soal Vietnam tidak jelas terlihat, tetapi lewat implikasi dan prasangka tersembunyi di tiap kalimatnya.

Pesan tersirat pada media *online* berbahasa Vietnam ingin menyampaikan pada publik asing bahwa Cina jahat, sekutu bermuka dua, menentang hukum internasional, dan memecah perdamaian daerah. Sementara itu, Vietnam digambarkan sebagai korban yang mentolerir Cina - teman yang baik dan pemaaf. Pesan disampaikan media dengan sangat lembut, diplomatis, dan bahasa rekonsiliasi untuk menggambarkan permusuhan dengan Cina. Hasil ini berkesinambungan dengan beberapa penelitian terdahulu. Bahwa media tidak mungkin berdiri netral. Terutama ketika negara tempat media tersebut beroperasi terlibat sebagai pihak yang bertikai.

Penelitian karya Nhung Bui ini membenarkan arti dan penerapan dari teori dan temuan dari studi yang lalu. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk mengembangkan konsep diplomasi publik dan jurnalisme damai agar lebih diterapkan pada media dengan struktur hukum serupa, seperti di Asia.

Penelitian “*War/ Peace Journalism Approach in Vietnamese Online Media Coverage of South China Sea Dispute*” karya Nhung Bui memiliki kesamaan dengan penelitian yang dibuat oleh peneliti. Kedua penelitian tersebut sama-sama membahas media dalam memberitakan konflik dengan menerapkan konsep jurnalisme damai.

Namun, terdapat beberapa perbedaan antara penelitian milik Nhung Bui dengan penelitian yang akan dibuat oleh peneliti. Pertama, penelitian milik Nhung Bui menggunakan penelitian kuantitatif - kualitatif, sedangkan penelitian milik peneliti hanya menggunakan penelitian kuantitatif. Kedua, teori yang digunakan oleh Nhung Bui adalah konsep jurnalisme damai dan perang, diplomasi publik, dan *World System Theory*, sedangkan penelitian milik peneliti menggunakan konsep jurnalisme damai sebagai konsep utama. Ketiga, penelitian Nhung Bui menggunakan media *online*, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti menggunakan tayangan televisi.

Dari ketiga penelitian terdahulu tersebut terdapat relevansi dengan penelitian peneliti di mana indikator jurnalisme damai yang ada dapat dikembangkan oleh peneliti. Salah satunya adalah dimensi orientasi pada kebenaran yang dalam penelitian terdahulu belum menggambarkan secara detail aspek tersebut.

## **2.2. Teori dan Konsep**

Teori merupakan sekumpulan asumsi, konsep, konstruk, definisi atau pengertian yang digunakan untuk menjelaskan sebuah fenomena secara sistematis

(Soehartono, 2008, p. 23). Dalam penelitian ini menggunakan teori tanggung jawab sosial disertai dengan konsep jurnalisme damai.

### **2.2.1 Teori Tanggung Jawab Sosial**

Teori tanggung jawab sosial muncul sebagai reaksi teori pers libertarian yang dinilai terlalu mementingkan kebebasan. Sebagai bentuk pengembangan dari teori libertarian, teori tanggung jawab sosial memperbolehkan siapa saja untuk menikmati kebebasan tetapi tetap bertanggung jawab pada masyarakat (Rivers, Jensen, & Peterson, 2008).

Teori tanggung jawab sosial merupakan salah satu dari empat teori yang dikemukakan oleh Fred S. Siebert, Theodore, Peterson, dan Wilbur Schramm pada tahun 1963. Berawal dari respon dan kritik terhadap surat kabar di Amerika yang bersifat sensasional, komersial, dan pencampuran berita dengan opini editorial, pada tahun 1942 dibentuklah komisi swasta untuk melakukan penelitian akan hal ini. Komisi ini didirikan oleh Henry Luce dan dikelola di bawah kepemimpinan Robert Hutchins yang merupakan rektor dari Universitas Chicago (McQuail, 2011, p. 187).

Komisi ini menjadi tonggak sejarah di Amerika Serikat. Beberapa komisi mulai melihat masalah spesifik dari aktivitas media, utamanya yang berkaitan dengan kekerasan, pornografi, dan keresahan masyarakat. Selain itu, kehadiran komisi ini juga menjadi peristiwa pertama sejak kebebasan pers yang dicapai ketika kebutuhan intervensi pemerintah untuk

membenarkan kesalahan pers dipertimbangkan. Penemuan dari komisi tersebut mendorong minoritas untuk bersuara (McQuail, 2011, p. 188).

Akhir dari laporan tersebut memunculkan gagasan tanggung jawab sosial (*social responsibility*) dan memberikan standar jurnalistik yang harus diterapkan dalam pers. Tanggung jawab sosial harus dilakukan dengan kontrol diri dan bukan dengan campur tangan pemerintah. Teori tanggung jawab sosial melibatkan pandangan tentang kepemilikan media sebagai salah satu bentuk pengawasan publik (McQuail, 2011, p. 188). Filosofi terkait dengan tradisi tanggung jawab sosial bahkan dipraktikan pada negara-negara, seperti Eropa Barat (McQuail, 2011, p. 189).

Dalam teori tanggung jawab sosial, kebebasan pers tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab (Rivers, Jensen, & Peterson, 2008, p. 101). Berikut ini adalah lima syarat yang menjadi tuntutan masyarakat modern dari pers, di antaranya:

### **1. Kebenaran dan makna dalam berita**

Media harus dapat membedakan secara jelas informasi mana yang merupakan peristiwa politik dan mana yang merupakan pendapat dari politisi. Media khususnya televisi seringkali tidak menampilkan kebenaran secara utuh karena waktu yang terbatas dan mahalnya liputan. Pada media penyiaran seperti televisi, peliputan berita secara langsung mengharuskan jurnalisnya untuk lebih hati-hati dan memilah mana yang merupakan berita dan mana yang sekadar pendapat. Hal ini dikarenakan,

media televisi dalam pemberitannya seringkali menambahkan komentar dan pendapat yang sulit dibedakan dari beritanya sendiri. Kebanyakan televisi dan koran sekadar memberitakan suatu peristiwa tanpa menggali informasi yang lebih dalam dan menjawab *mengapa* peristiwa itu terjadi (Rivers, Jensen, & Peterson, 2008, p. 105).

## **2. Penyebar gagasan**

Media harus menjadi forum pertukaran pendapat dan kritik. Hal ini untuk mengantisipasi minimnya wahana ekspresi publik akibat konsentrasi kepemilikan media. Media terutama televisi harus memberikan liputan setara untuk semua pihak dalam masalah yang memengaruhi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat (Rivers, Jensen, & Peterson, 2008, p. 106).

## **3. Wakil tiap kelompok dalam masyarakat**

Media harus memahami setiap kelompok masyarakat tanpa terjebak dalam *stereotype* dengan cara melihat pada aspirasi, kelemahan, dan prasangka mereka. Jika sebelumnya hal ini sulit ditemukan pada teori libertarian, maka saat ini media dituntut untuk lebih mementingkan persamaan sosial dan menghindari setiap konflik sosial (Rivers, Jensen, & Peterson, 2008, p. 108).

## **4. Klarifikasi tujuan masyarakat**

Media sebagai pendidik yang harus mengaitkan suatu peristiwa dengan tujuan dasar dan nilai-nilai masyarakat. Hal ini bukan berarti media harus mendramatisir pemberitaannya. Seperti halnya pemberitaan media yang

umumnya berkaitan dengan konflik. Tanpa ulasan yang jelas, khalayak akan merasa terteror dengan adanya konflik-konflik tersebut (Rivers, Jensen, & Peterson, 2008, p. 109).

## **5. Akses penuh informasi**

Media harus membuka akses seluas-luasnya ke berbagai sumber informasi. Demikian halnya dengan hak masyarakat untuk memperoleh informasi. Hak untuk memperoleh informasi ternyata penting bukan hanya bagi khalayak semata, tetapi juga bagi pengelola media dan pemerintah untuk menjalankan tugasnya (Rivers, Jensen, & Peterson, 2008, p. 109).

Konsepsi tanggung jawab sosial bukan hanya sekadar pergeseran selera untuk menjauhi teori libertarian. Faktanya, pemerintah dan khalayak memaksa media untuk lebih bertanggung jawab (Rivers, Jensen, & Peterson, 2008, p. 110). Sebagai bentuk tanggung jawab, dibentuklah lembaga pengawasan pers yang bernama Dewan Pers. Secara umum, Dewan Pers merupakan alat pengatur pers bagi negara yang menyatakan tanggung jawab terhadap publik. Fungsi dari Dewan Pers memberikan pesan tersirat agar pers memiliki standar kode etik atau prinsip (McQuail, 2011, p. 190).

Di Amerika Serikat misalnya, pada 1970-an terdapat dewan-dewan yang tersebar di beberapa kota. Semua dewan menjalankan fungsi yang sama, seperti membahas kinerja media, menerima pengaduan dari masyarakat, dan memberikan masukan kepada media untuk meningkatkan



tanggung jawabnya (Rivers, Jensen, & Peterson, 2008, p. 111). Bahkan sebelumnya, di negara Eropa seperti Swedia sudah membentuk komisi pengawasan praktik media sejak 1916 (Rivers, Jensen, & Peterson, 2008, p. 112).

Sama halnya dengan Amerika Serikat dan beberapa negara di Eropa, Indonesia juga memiliki dewan pers. Dewan pers di Indonesia pertama kali dibentuk pada tahun 1968. Pembentukan ini didasarkan pada Undang-Undang No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers yang ditandatangani Presiden Soekarno pada 12 Desember 1966. Pada masa itu, Dewan Pers diketuai oleh Menteri Penerangan. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU No. 11 Tahun 1966, Dewan Pers memiliki fungsi mendampingi pemerintah dalam bersama-sama membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional.

Selanjutnya, terdapat kode etik jurnalistik yang merupakan sebuah peraturan dari Dewan Pers. Kode etik jurnalistik mengacu pada serangkaian prinsip, perilaku profesional, dan hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh para jurnalis (McQuail, 2011, p. 190). Walaupun isi dari kode etik jurnalistik seringkali mencerminkan nilai Barat, beberapa elemen kunci diterjemahkan ke dalam konteks budaya lain. Seperti pada penelitian Hafez (2002). Hafez mencoba melakukan perbandingan kode jurnalisme di Eropa, Afrika Utara, Timur Tengah, dan muslim Asia. Temuan penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat kesepakatan internasional dari standar kebenaran dan

objektivitas yang harus menjadi nilai pokok dalam jurnalisme (McQuail, 2011, p. 192).

Sementara itu, jika dikaitkan dalam penelitian ini, teori tanggung jawab sosial menuntun media agar tidak hanya menjalankan peran bisnis saja melainkan tanggung jawab sosial. Media harus memikirkan konsekuensi dari tayangan beritanya kepada masyarakat luas.

### **2.2.2 Konsep Jurnalisme Damai**

Jurnalisme damai pertama kali dikenalkan oleh Johan Galtung, seorang profesor Studi Perdamaian dan juga direktur *TRANSCEND Peace and Development Network* pada 1970-an (Nurudin, 2009, p. 239). Galtung mencermati banyak jurnalisme perang yang mendasarkan karya jurnalistiknya pada nilai berita konflik sehingga yang ditonjolkan dalam sebuah peliputan hanya aspek menang dan kalah (Syam, 2015, p. 175).

Jurnalisme damai merupakan pengembangan dari jurnalisme perang. Jurnalisme perang selalu mendapat kritik jurnalisme perdamaian. Meskipun peradaban manusia bisa tumbuh dan berkembang karena perang. Akan tetapi, ini bukan berarti bahwa jurnalisme perang baik untuk diterapkan. Masalahnya, terdapat tuduhan bahwa jurnalisme perang tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah konflik (Nurudin, 2009, p. 239).

Hal ini bisa digambarkan melalui Perang Teluk pada 1997, di mana Amerika beserta sekutunya menyerang Irak. Salah satu televisi dunia CNN memberitakan peristiwa tersebut secara langsung dan vulgar.

Akibatnya, terjadi protes dari beberapa kalangan karena liputan perang tidak mengindahkan nilai jurnalisme dari sudut kemanusiaan. Lahirnya jurnalisme damai sebagai akibat dari kejenuhan audien terhadap berita konflik, kekerasan, yang kurang manusiawi (Syam, 2015, p. 176).

Jurnalisme damai melaporkan suatu kejadian dengan bingkai yang lebih luas, berimbang, dan akurat yang didasarkan pada informasi mengenai konflik. Wartawan yang berorientasi kepada kebenaran harus menggali proses terjadinya konflik dan membantu menemukan titik apinya. Liputan dengan pendekatan jurnalisme damai dapat berperan dalam usaha rekonsiliasi dalam konflik (Syam, 2015, p. 179).

Berikut ini terdapat karakteristik jurnalisme damai, di antaranya (Syam, 2015, p. 185):

1. Jurnalisme damai melihat perang sebagai sebuah masalah
2. Jurnalisme damai melihat perang sebagai ironi yang tidak seharusnya terjadi
3. Jurnalisme damai lebih mementingkan empati kepada korban daripada liputan konflik yang kontinyu
4. Jurnalisme damai menonjolkan rekonsiliasi kedua belah pihak
5. Jurnalisme damai mengedepankan harapan dan hasrat untuk berdamai daripada aroma dendam dan kebencian kepada kedua belah pihak

6. Jurnalisme damai memberitakan konflik apa adanya dan memberikan porsi yang sama kepada semua pihak atau versi yang muncul dalam wacana konflik
7. Jurnalisme damai mengungkapkan ketidakbenaran kedua belah pihak dan menghindari keberpihakan
8. Jika perlu, jurnalisme damai menyebutkan pelaku kejahatan dari kedua belah pihak

Sementara itu, tujuan dari jurnalisme damai adalah memetakan konflik, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat, dan menganalisis tujuan-tujuan mereka. Selain itu, jurnalisme damai memberikan jalan baru bagi pihak-pihak yang bertikai untuk menyelesaikan konflik secara kreatif dan tidak memakai jalan kekerasan (Syam, 2015, p. 187).

Sayangnya, jurnalisme damai tidak semudah itu untuk diterima oleh pers karena anggapan bahwa liputan ini memiliki nilai jual yang rendah dibandingkan liputan kekerasan (Syam, 2015, p. 180). Unsur kekerasan masih dianggap memiliki daya tarik sendiri bagi sebuah pemberitaan (Syam, 2015, p. 178).

Pendapat Johan Galtung akhirnya diikuti oleh Lynch and McGoldrick yang turut serta mendorong jurnalis mengubah teori klasik jurnalisme perang menjadi jurnalisme damai (Syam, 2015, p. 184). Lynch and McGoldrick (2005) mendefinisikan jurnalisme damai sebagai seperangkat alat, baik konseptual maupun praktis untuk melengkapi

jurnalis agar dapat memberikan layanan publik lebih baik (Shaw, 2012, p. 45).

Hal ini dimaksudkan agar jurnalis tidak mengabarkan sebuah konflik secara sembarangan yang bisa mengakibatkan berita tentang konflik tersebut bersifat provokatif dan malah memperburuk konflik yang sudah ada. Analisis konflik dalam jurnalisme damai berguna untuk membiasakan jurnalis membuat literasi minim kekerasan (Lynch & McGoldrick, 2005, p. 77).

Dalam konteks jurnalisme damai, solusi yang harus dicari adalah solusi yang bersifat ‘sama-sama menang.’ Kemampuan ini wajib dimiliki oleh jurnalis-jurnalis dalam media yang menerapkan jurnalisme damai (Lynch & McGoldrick, 2005, p. 79). Sementara itu, dalam membuat berita terdapat pendekatan dari jurnalisme damai. Hal ini berbeda dengan pendekatan jurnalisme perang yang tujuannya untuk mencari pemenang dari sebuah konflik (Lynch & McGoldrick, 2005, p. 28).

**Tabel 2.1**

**Pendekatan Jurnalisme Damai dan Pendekatan Jurnalisme Perang oleh Prof. Johan Galtung**

| Jurnalisme Damai   | Jurnalisme Perang   |
|--|---|
| <p><b>1. Berorientasi Pada Konflik</b></p> <p>Jurnalisme damai melakukan peliputan mengenai sebuah konflik secara komprehensif. Media hendaknya membahas mengenai sebab, akibat, serta solusi dari sebuah konflik agar konflik tersebut menjadi transparan.</p>  | <p><b>1. Berorientasi Pada Kekerasan</b></p> <p>Pendekatan jurnalisme perang fokus terhadap kekerasan yang terjadi selama konflik berlangsung. Pendekatan ini juga cenderung menunggu hingga kekerasan terjadi, baru mengabarkan kekerasan tersebut sebagai berita.</p> |
| <p><b>2. Berorientasi Pada Kebenaran</b></p> <p>Pendekatan jurnalisme damai mengekspos kebohongan yang ada pada pihak-pihak yang berkonflik. Pendekatan jurnalisme damai fokus pada penderitaan yang disebabkan oleh konflik. Jurnalis tidak boleh takut untuk mengabarkan nama pihak yang melakukan tindakan fisik dalam konflik.</p> | <p><b>2. Berorientasi Pada Propaganda</b></p> <p>Pendekatan jurnalisme perang mengekspos sebagian dari kebenaran dari suatu pihak yang berkonflik.</p>  |
| <p><b>3. Berorientasi Pada Masyarakat</b></p>  | <p><b>3. Berorientasi Pada Kaum Elite</b></p>   |

|  |   |
|--|---|
| <p>Pendekatan jurnalisme damai fokus pada penderitaan yang disebabkan oleh konflik. Jurnalis tidak boleh takut untuk mengabarkan nama pihak yang melakukan tindakan fisik dalam konflik.</p>   | <p>Pendekatan jurnalisme perang seringkali rela dijadikan ‘corong’ oleh kaum elite dalam sebuah konflik.</p>  |
| <p><b>4. Berorientasi Pada Pencapaian Solusi</b><br/>Pendekatan jurnalisme damai melakukan penekanan pada langkah-langkah dengan berusaha mewujudkan perdamaian, serta fokus terhadap orang-orang yang berusaha mewujudkan perdamaian.</p> | <p><b>4. Berorientasi Kemenangan</b><br/>Pendekatan jurnalisme perang menutup-nutupi usaha dalam mewujudkan perdamaian sebelum kemenangan berada di pihak yang didukungnya.</p> |

(Sumber: Galtung, 2003)

Pada poin pertama, yaitu “Berorientasi pada Konflik”. Media diharapkan mampu meliput sebuah konflik secara keseluruhan dan tidak hanya memberitakan aspek kekerasan dari pertempuran. Media seharusnya juga memberitakan sebab, dampak, serta solusi dari konflik. Hal ini yang membedakan jurnalisme damai dengan jurnalisme perang, di mana jurnalisme perang hanya berorientasi pada kekerasan (Lynch & McGoldrick, 2005, p. 8).

Jurnalis media juga diharapkan tidak membuat konflik seolah-olah adalah pertarungan dua pihak untuk memperebutkan sesuatu. Sebaiknya konflik digambarkan sebagai masalah yang timbul karena

adanya ketidaksepahaman antara beberapa pihak dan dapat ditanggulangi bila kesepakatan dapat tercapai (Lynch & McGoldrick, 2005, p. 30).

Dari segi bahasa, jurnalisme damai menghindari *victimizing language*, *demonizing language*, dan *emotive*. *Demonizing language* merupakan pemberian label yang digunakan oleh salah satu pihak yang berkonflik kepada pihak lainnya dan penggunaan kata sifat yang hanya menjelaskan konflik dari satu sisi, misalnya fanatik, teroris, kejam, sadis, dan lain-lain (Lynch & McGoldrick, 2005, p. 29).

Kemudian, *victimizing language* merupakan kata keterangan, kata kerja, kata sifat yang digunakan secara sengaja guna melebih-lebihkan dampak yang disebabkan oleh konflik pada salah satu pihak, misalnya putus asa, tidak berdaya, menyedihkan, dan lain-lain (Lynch & McGoldrick, 2005, p. 29). Terakhir, bahasa *emotive* yang diartikan sebagai bentuk kata kerja, kata keterangan, dan kata sifat yang digunakan untuk melebih-lebihkan apa yang terjadi pada masyarakat yang terdampak konflik, seperti tragedi, pembantaian, dan lain-lain (Lynch & McGoldrick, 2005, p. 31).

Pada poin kedua, yaitu “Berorientasi pada Kebenaran”, media melalui jurnalis-jurnalisnya diharapkan mampu bersikap objektif dan membongkar kebohongan dari kedua belah pihak yang berkonflik (Lynch & McGoldrick, 2005, p. 15). Berbeda dengan jurnalisme perang



yang membongkar suatu kebohongan, namun menutupi kebohongan pihak yang dibela oleh jurnalis atau media tersebut.

Pada poin kedua ini, jurnalis juga diharapkan berhati-hati dalam menggunakan istilah atau kata-kata. Hal ini dikarenakan untuk mengantisipasi gambaran keliru jurnalis pada satu pihak. Selain itu, dalam memberikan opini jangan langsung menyimpulkan atau mengabarkannya seperti fakta. Bila harus memberitakan opini seseorang, maka pastikan bahwa pembaca bisa dengan jelas mengetahui bahwa yang diberitakan merupakan sebuah opini, bukan fakta (McGoldrick & Lynch, 2000, p. 32).

Selain itu, dalam memberitakan korban, jurnalis harus melakukan verifikasi jumlah korban sebelum menyimpulkan dengan istilah-istilah, seperti genosida, pembantaian. Jurnalis harus melakukan verifikasi apakah korban meninggal dalam pembantaian atau dalam suatu pertarungan (McGoldrick & Lynch, 2000, p. 31).

Pada poin ketiga, yaitu “Berorientasi pada Masyarakat”, jurnalis diharapkan dapat menyertakan suara narasumber yang menjadi korban dari konflik, misalnya rakyat biasa sehingga informasi yang didapat tidak hanya berasal dari pemimpin suatu pihak yang berkonflik saja. Informasi yang didapat dari orang-orang yang merasakan dampak konflik secara langsung dapat dimintai klarifikasinya kepada pemimpin pihak yang berkonflik (McGoldrick & Lynch, 2000, p. 30). Hal ini

dimaksudkan agar jurnalis tidak dijadikan sebagai “corong” untuk pemimpin-pemimpin pihak-pihak yang sedang berkonflik (McGoldrick & Lynch, 2000, p.30).

Pada poin terakhir, yaitu “Berorientasi pada Pencapaian Solusi”, jurnalis diharapkan menghindari informasi yang membuat konflik berangsur-angsur. Jurnalis dapat memfokuskan pemberitaan kepada langkah-langkah yang mungkin dapat diambil oleh pihak yang berkonflik agar dapat menghentikan konflik. Beritakan hal-hal yang dapat memicu terjadinya perdamaian, misalnya semua pihak yang berkonflik sama-sama ingin agar konflik cepat diselesaikan karena konflik membutuhkan banyak biaya (McGoldrick & Lynch, 2000, p. 31). Selain itu, jurnalis dapat memberikan informasi seputar solusi dari berbagai sumber. Usulan solusi yang diberitakan mungkin bisa memicu dialog antara pihak-pihak yang berkonflik untuk berdamai (McGoldrick & Lynch, 2000, p. 33).

Jurnalisme damai harus bersikap proaktif (antisipasi, memulai peliputan jauh sebelum perang atau kekerasan muncul), mengulas akibat kekerasan yang tidak tampak (trauma secara emosional, kerusakan keharmonisan masyarakat dan budaya), berorientasi pada masyarakat atau *people-oriented* (fokus pada masyarakat biasa sebagai aktor dan sumber informasi), memberitakan area persetujuan yang memicu solusi konflik, memberitakan penyebab dan konsekuensi

konflik, menghindari penggunaan label sosok yang baik dan sosok yang jahat, orientasi pada banyak kelompok atau *multi-party orientation*, bukan partisan, orientasi menang-menang.

Berdasarkan pentingnya melakukan jurnalisme damai, Johan Galtung sampai pada kesimpulan yang dibuat ke dalam tabel sebagai berikut (Nurudin, 2009, p. 240):

**Tabel 2.2**  
**Indikator Jurnalisme Damai**

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Orientasi Konflik/Perdamaian | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Orientasi pada “<i>win-win</i>”</li> <li>- Keterbukaan waktu dan ruang; sebab dan hasil, juga histori/budaya</li> <li>- Membuat konflik menjadi transparan</li> <li>- Memberikan suara kepada semua partai/kelompok kepentingan; empati, pengertian</li> <li>- Melihat konflik/perang sebagai masalah, fokus pada penciptaan konflik</li> <li>- Humanisasi di setiap sisi</li> <li>- Proaktif: pencegahan sebelum terjadinya konflik/perang</li> <li>- Fokus pada efek kekerasan yang tak nampak (trauma, kerusakan struktur/budaya)</li> <li>- Menghindari penggunaan bahasa <i>demonizing, victimizing, emotive</i></li> </ul> |
|------------------------------|---|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Orientasi Kebenaran   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengekspos kebenaran di semua sisi (faktual, akurat, lengkap)</li> </ul>   |
| Orientasi Kemanusiaan | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fokus pada penderitaan semua pihak; perempuan, anak-anak. Memberikan suara untuk pihak yang lemah</li> <li>- Menyebutkan aktor konflik</li> <li>- Fokus pada orang yang merintis perdamaian</li> </ul>   |
| Orientasi Solusi      | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Damai tanpa kekerasan</li> <li>- Fokus pada inisiatif untuk menciptakan perdamaian dan mencegah perang</li> <li>- Fokus pada kondisi struktur, budaya, dan kedamaian masyarakat</li> <li>- Berujung pada resolusi, rekonstruksi, dan rekonsiliasi</li> </ul> |

(Sumber: Galtung, 2003)

Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti akan menggunakan tabel di atas sebagai indikator jurnalisme damai. Hal ini dikarenakan tabel jurnalisme damai milik Johan Galtung sesuai dengan kebutuhan jurnalistik di Indonesia. Berdasarkan tabel di atas, terdapat empat dimensi, yaitu yang sudah dijelaskan pada tabel 2.1, yaitu berorientasi pada konflik/perdamaian, berorientasi pada kebenaran, berorientasi pada masyarakat, dan berorientasi pada solusi.

Empat dimensi tersebut mengandung 17 indikator. Penjelasan dari 17 indikator tersebut adalah demikian:

Pada orientasi konflik/perdamaian terdapat isi berita memiliki orientasi pada “win-win” yang berarti mengungkapkan proses terjadinya konflik, X pihak, Y tujuan, dengan Z isu (Syam, 2015, p. 187), serta menggali pemberitaan yang berorientasi pada “win-win”, artinya pemberitaan mengenai konflik Papua Barat harus mampu menggali proses terjadinya konflik dan liputan pada situasi kedua belah pihak menang (“*win-win orientation*”), bukan berorientasi pada perang atau kekerasan yang fokus pada arena konflik dengan menghadirkan peperangan dan pertarungan menang-kalah (“*win-lost orientation*”) (Budiman & Saroso, 2012, p. 167). Ini juga berarti, media menelusuri unsur-unsur dalam konflik, misalnya: berapa pihak yang terlibat, apa tujuannya, apa yang menjadi masalah yang diperdebatkan, dengan perspektif mencari penyelesaian (Lynch & McGoldrick, 2002, p. 11).

Selanjutnya, mengungkap penyebab. Keterbukaan waktu dan ruang; sebab dan hasil, juga histori/budaya, artinya pemberitaan terkait konflik Papua barat harus melihat kasus secara luas. Dengan begitu, penyebab dari suatu kasus bisa ditemukan karena keterbukaan ruang dan waktu, sehingga kasus tidak tersekat oleh suatu hal. Faktor budaya juga harus diperhatikan sebagai upaya menjadikan pemberitaan berorientasi pada kebenaran. Selain itu, berita tidak memfokuskan konflik hanya pada saat dan tempat kekerasan terjadi, melainkan juga menelusuri hubungan dan akibat-akibat yang terjadi pada masyarakat di

tempat lain, saat ini dan saat mendatang (Marpaung & Suranto, 2001, p. 27). Dengan kata lain, orientasi pemberitaan tidak hanya mengenai lokasi dan peristiwa konflik, tetapi juga mengungkapkan latar belakang terjadinya konflik.

Lalu, transparansi konflik yang berarti menghadirkan narasumber untuk bersuara. Pemberitaan konflik Papua Barat harus transparan, artinya tidak ada hal yang ditutupi dan tidak ada hal yang dirahasiakan, masyarakat bisa mengakses kebenaran dari penyebab kekerasan yang terjadi. Memberikan kesempatan bersuara kepada seluruh pihak, termasuk pihak yang tak mampu bersuara (“*give voice to the voiceless*”) (Budiman & Saroso, 2012, p. 167). Pemberitaan terkait konflik Papua Barat harus memberikan kesempatan bagi semua elemen, baik yang tidak terlibat dalam konflik maupun yang terlibat langsung. Transparansi juga berarti memuat pernyataan pihak untuk berempati, bersimpati, dan pengertian.

Lalu, isi berita menawarkan solusi terhadap konflik. Melihat konflik/perang sebagai masalah, fokus pada penciptaan konflik. Pemberitaan terkait konflik Papua Barat harus melihat kekerasan yang terjadi sebagai masalah, bukan sebagai sumber pendapatan (*income*) atau hal yang lainnya yang mengakibatkan tidak mencerminkan pemberitaan yang berorientasi pada perdamaian. Sementara itu,

keaktivitas yang dimaksud adalah usaha pencapaian perdamaian dalam konflik (Juliansyah, 2016, p. 40).

Selanjutnya, isi berita melihat sisi kemanusiaan. Humanisasi di setiap sisi, artinya pemberitaan terkait konflik Papua Barat harus melihat sisi kemanusiaan dari berbagai sisi dan mengemukakan penggunaan senjata dan memberikan informasi mengenai dampak negatif penggunaan senjata (Juliansyah, 2016, p. 40).

Indikator selanjutnya, isi berita proaktif. Proaktif berarti pencegahan sebelum terjadinya konflik, dalam konflik atau kekerasan biasanya tidak terjadi sekali. Jika kasus kekerasan maka dipastikan akan ada kasus kekerasan selanjutnya, maka dari itu pemberitaan terkait konflik Papua Barat harus mampu mencegah konflik atau kekerasan selanjutnya. Sementara itu, reaktif berarti hanya menunggu kekerasan untuk dapat diliput dan berfokus pada efek yang bisa dilihat mata (korban yang tewas, terluka, dan mengalami kerusakan material) (Budiman & Saroso, 2012, p. 167).

Indikator selanjutnya, isi berita menginformasikan efek kekerasan yang tidak tampak (*invisible effect of violence*), seperti trauma, keinginan mendapatkan kejayaan, pengrusakan terhadap struktur/budaya (Lynch & McGoldrick, 2005).

Indikator selanjutnya, dari segi bahasa, jurnalisme damai menghindari *victimizing language*, *demonizing language*, dan *emotive*.

*Demonizing language* merupakan pemberian label yang digunakan oleh salah satu pihak yang berkonflik kepada pihak lainnya dan penggunaan kata sifat yang hanya menjelaskan konflik dari satu sisi, misalnya fanatik, teroris, kejam, sadis, dan lain-lain (Lynch & McGoldrick, 2005, p. 29).

Kemudian, *victimizing language* merupakan kata keterangan, kata kerja, kata sifat yang digunakan secara sengaja guna melebih-lebihkan dampak yang disebabkan oleh konflik pada salah satu pihak, misalnya putus asa, tidak berdaya, menyedihkan, dan lain-lain (Lynch & McGoldrick, 2005, p. 29). Terakhir, bahasa *emotive* yang diartikan sebagai bentuk kata kerja, kata keterangan, dan kata sifat yang digunakan untuk melebih-lebihkan apa yang terjadi pada masyarakat yang terdampak konflik, seperti tragedi, pembantaian, dan lain-lain (Lynch & McGoldrick, 2005, p. 31).

Selanjutnya, faktual berarti berita tidak mengandung pencampuran fakta dan opini. Fakta dibagi menjadi tiga jenis, yaitu fakta sosiologis atau sesuai dengan kejadian yang sebenarnya, fakta psikologis atau sesuai dengan opini dari narasumber, fakta campuran yang berarti gabungan dari fakta sosiologis dan fakta psikologis (Aprilia, 2019, p. 25). Lalu akurat, yaitu berita yang ditulis dengan kecermatan tinggi dari penulisnya, karena penulis berita harus memiliki kecermatan yang tinggi untuk menghindari kesalahan fatal, hal akurasi



itu meliputi ejaan, nama, angka, tanggal, dan usia (Aprilia, 2019, p. 25). Lalu, lengkap, yaitu kelengkapan penulisan berita harus sesuai dengan 5W+1H (*what, when, where, who, why, dan how*) (Aprilia, 2019, p. 25).

Selanjutnya, isi berita terdapat pernyataan dari pihak yang lemah. Pihak yang lemah dalam hal ini adalah wanita, anak-anak, dan mereka yang tak mampu berbicara (Syam, 2015, p. 181). Lalu, isi berita menyebutkan aktor konflik. Menyebutkan semua pelaku kesalahan dan memperlakukan pihak-pihak yang bertikai secara setara karena telah melakukan kekerasan (Lynch & McGoldrick, 2002, p. 33). Jurnalisme damai berusaha mengungkapkan ketidakbenaran di kedua belah pihak, bahkan jika perlu menyebutkan nama pelaku kejahatan (*evil-doers*) dari kedua belah pihak (Syam, 2015, p. 184).

Lalu, isi berita terdapat aktor yang merintis perdamaian. Fokus pada orang yang merintis perdamaian, artinya pemberitaan konflik Papua Barat harus fokus pada orang-orang atau kelompok yang berupaya untuk menyelesaikan kekerasan dan menciptakan perdamaian. Oleh karena itu, pemberitaan terkait konflik Papua Barat harus fokus pada pihak yang pro pada perdamaian, bukan kepada pihak yang mempunyai kepentingan sendiri dan yang menciptakan kekerasan (Juliansyah, 2016, p. 42).

Selanjutnya, Isi berita tidak mengandung kekerasan. Damai tanpa kekerasan, Johan Galtung (1996) mengatakan damai adalah sebuah

transformasi konflik kreatif non kekerasan. Maka dalam membuat pemberitaan harus menyelesaikan kekerasan tanpa ada kekerasan. Kekerasan dalam hal ini, berarti memukul, menampar, mencekik, menendang, menginjak, menganiyaya, membentak, menyumpah, merendahkan, dan lain-lain (Santoso, 2002, p.168).

Lalu, isi berita melihat efek jangka panjang pada struktur, budaya, dan kearifan lokal. Fokus pada kondisi struktur, budaya, dan kedamaian masyarakat. Pemberitaan terkait konflik Papua Barat harus melihat hal yang penting dibalik kekerasan yang terjadi. Oleh karena itu, pemberitaan harus berfokus kepada hal yang tidak tampak dan efek kerusakan yang terjadi pada jangka panjang, seperti struktur, budaya, dan kearifan lokal (Juliansyah, 2016, p. 43).

Indikator terakhir, isi berita mengandung resolusi, rekonstruksi, dan rekonsiliasi. Berujung pada resolusi, rekonstruksi, dan rekonsiliasi. Pemberitaan yang dilakukan harus mampu melahirkan atau menawarkan solusi baru. Rekonstruksi sebagai upaya membangun kembali akibat dari kekerasan yang terjadi dan rekonsiliasi sebagai upaya untuk memulihkan kembali dan memperbaiki keadaan kepada pihak yang terlibat langsung pada kekerasan maupun tidak (Juliansyah, 2016, p. 43).

### 2.2.3 Berita Konflik

*News is conflict.* Berita adalah konflik atau segala sesuatu yang mengandung unsur atau sarat dengan dimensi pertentangan. Sebagai sumber berita, konflik dan pertentangan tidak akan pernah habis untuk diberitakan (Sumadiria H. , 2006, p. 86).

Dalam menguji suatu informasi layak menjadi berita, McQuail (1987) membaginya ke dalam tujuh nilai berita, yaitu: (1) *Timeless*, (2) *Impact*, (3) *Prominence*, (4) *Proximity*, (5) *Conflict*, (6) *The unusual*, (7) *The currency*. Konflik dapat diartikan sebagai suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung pertentangan antara seseorang, masyarakat, atau lembaga (Baksin, 2013, p. 50).

Ketika terjadi perselisihan antar individu dan menyebar luas serta banyak diketahui oleh orang, maka perselisihan tersebut berubah menjadi masalah sosial. Hal tersebut mendorong orang yang secara naluriah menyukai konflik dengan catatan konflik tersebut tak menyangkut dirinya dan tidak mengganggu kepentingannya (Sumadiria H. , 2006, p. 87). Kebanyakan konflik adalah layak berita. Konflik fisik seperti perang atau perkelahian adalah layak berita karena biasanya ada kerugian dan korban (Ishwara, 2005, p. 53).

Berita yang mengandung konflik atau perseteruan antara satu pihak dengan pihak lainnya merupakan berita yang bagus dan sering kali menghasilkan gambar yang lebih bagus. Media penyiaran akan lebih

memilih berita yang mengandung konflik atau perseteruan daripada berita yang tanpa konflik (Morissan, 2008, p. 22). Perang, pembunuhan, dan kekerasan biasanya mendapat tempat di halaman awal. Selain konflik fisik, debat-debat mengenai pencemaran, reaktor nuklir, dan beberapa isu lain yang menyangkut kehidupan manusia menjadi bahan penting dalam pemberitaan (Ishwara, 2005, p. 53).

Namun, sebagaimana dikemukakan Tuggle dan Carr (2004) dalam bukunya *Broadcast News Handbook: Showing conflict simply for the sake of showing it isn't good decision making. Unless we provide some context, we've done the viewers a disservice.* (Menampilkan konflik semata-mata untuk sekadar mempertunjukkannya saja bukanlah keputusan yang bagus. Kecuali kita memberikan konteks atau hubungan, kita telah membuat penonton merasa tidak enak). Hal ini berarti kita tidak bisa menampilkan video orang berkelahi atau pelajar yang sedang tawuran sebagai suatu *show* semata-mata, tetapi kita harus memberikan alasan mengapa kita perlu menunjukkan gambar-gambar tersebut (Morissan, 2008, p. 22).

#### **2.2.4 Media Massa**

Media massa merupakan alat yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber ke khalayak penerima dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti yang terdapat pada beberapa media baik itu surat kabar, film, radio, dan televisi (Cangara, 2008, p. 123).

Fred S. Siebert dalam bukunya *Communications in Modern Society* (1948), media massa tak mungkin memikul semua tanggung jawab dalam penyebaran tentang kebenaran. Media hanya mungkin mengatakan banyak tentang kebenaran sehingga publik mengetahui kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung (Baksin, 2013, p. 49).

Media massa modern terbagi menjadi dua, yaitu media massa yang tercetak dalam sebuah kertas (media cetak) dan media yang terdiri dari perangkat mesin – mesin (media elektronik). Media massa cetak, misalnya majalah, surat kabar, dan lain sebagainya, sedangkan media elektronik, seperti radio dan televisi (Nurudin, 2009, p. 3).

Sebagai media massa, televisi dalam tayangan beritanya sudah menjadi bagian dari kehidupan. Dengan sifatnya yang *immediately*, media televisi mampu mendekatkan peristiwa dan tempat kejadian dengan penontonnya (Baksin, 2013, p. 59). Siaran televisi sesuai dengan sifatnya dapat diikuti (audio dan visual) secara bersamaan oleh semua lapisan masyarakat, namun tidak dapat memuaskan semua lapisan masyarakat. Siaran televisi dapat membuat kagum dan memukau penontonnya, tetapi sebaliknya siaran televisi dapat membuat jengkel dan rasa tidak puas penonton (Morissan, 2008, p. 6)

Televisi sebagai media massa memiliki kelebihan. Berikut ini adalah keunggulan dari televisi, yaitu (Alatas, 1997, p. 30):

1. Menyangkut isi dan bentuk, media televisi walaupun direkayasa mampu membedakan fakta dan isi, realistis, dan tidak terbatas.
2. Menyangkut hubungan dengan khalayaknya, media televisi mempunyai khalayak yang tetap, memerlukan keterlibatan tanpa perhatian sepenuhnya dan intim.
3. Media televisi memiliki tokoh berwatak (baik rill maupun yang direkayasa), sedangkan media lain (khususnya film) hanya memiliki bintang yang direkayasa.

Tidak hanya dari segi pragmatis, televisi juga unggul dari aspek teknologi. Berikut ini adalah keunggulan televisi dari aspek teknologi (Alatas, 1997, p. 30):

1. Mampu menjangkau wilayah yang sangat luas dalam waktu bersamaan sehingga dapat mengantarkan secara langsung suatu peristiwa di suatu tempat ke berbagai tempat lain yang berjarak sangat jauh.
2. Mampu menciptakan suasana yang bersamaan di berbagai wilayah jangkauannya, mendorong khalayaknya memperoleh informasi, dan melakukan interaksi secara langsung.

Meskipun begitu, televisi juga memiliki kelemahan, di antaranya (Alatas, 1997, p. 30):

1. Kecenderungan televisi untuk menempatkan khalayaknya sebagai objek yang pasif, yaitu penerima pesan.

2. Media televisi juga mendorong proses alih nilai dan pengetahuan yang cepat tanpa mempertimbangkan perbedaan tingkat, perbedaan budaya, dan peradaban yang ada di berbagai wilayah jangkauannya.
3. Media televisi bersifat sangat terbuka dan sulit dikontrol dampak negatif-nya. Media ini mampu menyita waktu dan perhatian khalayaknya untuk meninggalkan aktivitasnya yang lain pada waktu bersamaan.
4. Cepatnya perkembangan teknologi penyiaran televisi bergerak mendahului perkembangan masyarakat dan budaya khalayaknya di berbagai wilayah yang berbeda. Ini pada gilirannya yang melahirkan pro-kontra tentang implikasi kultural dari televisi seperti isu-isu *imperialisme cultural* dari negara-negara asing yang dengan bebas menayangkan acara-acara yang dianggap bertentangan dengan budaya lokal dari suatu masyarakat.

Sebagai salah satu medium yang digunakan untuk menyampaikan berita, televisi menayangkan beberapa macam format berita. Suatu format dipilih karena terdapat alasan untuk itu. Dalam menentukan format berita, Morisan memberikan jabaran mengenai beberapa kriteria format berita dalam program berita televisi, di antaranya (Morissan, 2008, p. 35):

1. *Reader (RDR)*, yaitu cara paling dasar dalam menyajikan sebuah berita di televisi. Pada format ini, pembawa berita akan

memberikan informasi tanpa didukung dengan video atau gambar.

2. *Voice Over* (VO), yaitu keseluruhan narasi yang terdapat dalam video dibacakan oleh pembawa berita di mana suara pembawa berita mengiringi video atau gambar.
3. *Reader Sound on Tape* (RDR SOT), yaitu *lead* dibacakan oleh presenter, lalu dilanjutkan dengan munculnya *soundbite on tape* (SOT)
4. *Voice Over Sound on Tape* (VO SOT), yaitu gabungan antara format VO dan SOT, di mana VO mengenai sebuah peristiwa saling terkait dengan apa yang diungkapkan dalam SOT.
5. *Reader-Grafis* (RDR-GRF), yaitu *lead* dibacakan oleh pembawa berita dan tidak ada video atau gambar melainkan hanya ilustrasi grafis atau foto. Format ini digunakan ketika peristiwa penting baru saja terjadi dan stasiun televisi belum mendapatkan gambar rekamannya.
6. *Package* (PKG), yaitu laporan berita lengkap dengan narasi VO yang sudah dibacakan oleh *dubber*.
7. *Live Report* (laporan langsung), yaitu penyampaian berita secara langsung ditempat kejadian.



8. *Breaking News*, yaitu tayangan berita yang tidak dijadwalkan dan dapat terjadi kapan saja ketika terjadi peristiwa yang penting dan harus segera diberitakan.
9. Laporan Khusus, yaitu laporan panjang yang lengkap dengan durasi 30 menit atau lebih terkait beberapa peristiwa, seperti hukum, politik, kriminal, bencana, dan lain-lain.

#### **2.2.4.1 Voice Over Sound on Tape (VO SOT)**

VO SOT adalah format berita yang memadukan antara *voice over* dengan *sound on tape*. *Lead in* dan isi tubuh berita dibacakan oleh penyiar dengan diakhiri SOT narasumber (Harahap, 2006, p. 56). VO pada format ini berisi peristiwa atau isu yang relevan dan terkait dengan apa yang diungkapkan dalam SOT. Sementara itu, SOT merupakan bagian pernyataan narasumber yang penting ataupun spesifik (Morissan, 2008, p. 36).

Dalam menentukan format VO SOT perlu memperhatikan beberapa hal, seperti narasi VO yang menjadi pengantar sebelum SOT tidak boleh sama dengan isi SOT. Kemudian, durasi VO SOT maksimal adalah 90 detik yang terdiri dari VO selama 50 detik dan durasi SOT selama 40 detik. Sesudah SOT, sering diakhiri dengan *tag oncam* presenter untuk menutup berita tersebut (Morissan, 2008, p. 37).

#### **2.2.4.2 Package (PKG)**

PKG adalah format berita yang *lead* – nya dibacakan oleh penyiar tetapi isi berita di *dubbing* oleh reporter atau narator lainnya dan diselingi dengan SOT (Harahap, 2006, p. 58). Kebanyakan televisi menghadirkan format ini. Durasi sebuah paket adalah 1,5 menit hingga 2,5 menit. Terdapat juga durasi paket yang lebih lama, misalnya 5 menit atau bahkan 30 menit untuk sebuah laporan khusus (Morissan, 2008, p. 37).

Dalam sebuah paket biasanya berisi gambar, narasi, suara alami, kutipan langsung narasumber, grafis, dan laporan reporter di depan kamera. Selain itu, paket juga selalu dimulai dengan pembacaan intro oleh presenter. Intro bertujuan untuk memancing minat penonton dengan menyajikan beberapa fakta yang menarik dan penting.

Terdapat beberapa kriteria untuk format PKG, seperti intro paket minimal tiga kalimat, tersedia banyak data yang berbobot, paket biasanya terdiri dari bagian-bagian yang merupakan rangkaian utuh dan tidak boleh ada pengulangan antara bagian satu dengan yang lain (Morissan, 2008, p. 38).

### **2.3 Alur Penelitian**

Konflik Papua Barat yang terjadi pada Agustus 2019, diliput dengan cara yang berbeda-beda oleh media di Indonesia. Di samping itu, terdapat panduan

konsep jurnalisme damai yang semestinya diterapkan dalam meliput konflik Papua Barat. Konsep ini penting diterapkan karena jika jurnalis tidak memiliki pemahaman mengenai aspek-aspek jurnalisme damai, maka pemberitaan yang mereka lakukan hanya sebatas memenuhi kebutuhan *rating* dan pasar.

Hal tersebut tentunya berbahaya karena dapat memperpanjang konflik dan media lebih menonjolkan aspek sensasional dibandingkan solusi atau perdamaian. Sehingga, peneliti membuat rumusan masalah dengan tujuan mendapatkan gambaran sejauh mana media televisi memperhatikan aspek-aspek jurnalisme damai dalam liputannya.

Kemudian, peneliti ingin mencoba menjawab rumusan masalah tersebut dengan menggunakan konsep jurnalisme damai milik Prof. Johan Galtung yang terbagi menjadi empat poin, yaitu berorientasi pada konflik, berorientasi pada kebenaran, berorientasi pada masyarakat, dan berorientasi pada solusi. Dari situ, maka akan dapat diketahui sejauh mana Kompas TV, TV One, dan iNews menerapkan prinsip jurnalisme damai, mengingat televisi adalah tayangan yang penetrasinya cukup tinggi dan dampak yang lebih kuat dibandingkan teks. Dengan mengetahui angka dari masing-masing media, dapat menjadi evaluasi bagi media-media tersebut agar lebih ketat lagi dalam menerapkan aspek jurnalisme damai untuk pemberitaan konflik.